



Sejarah Perkembangan Pers di Indonesia Ditinjau dari Segi Pendidikan

Iramdhan

Dosen Tetap Universtas Indraprasta PGRI: Iramdhan18@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 10 Agustus 2019

Direvisi: 25 Agustus 2019

Dipublikasikan: 31 Agustus

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.3382834

Abstract:

The purpose of this study is to further understand the development of the press in Indonesia from the colonial era to the reform era. The research method uses qualitative research. By collecting secondary data. The press is a social institution and a vehicle for mass communication that carries out journalistic activities including searching, possessing, acquiring, storing, processing, and conveying information in the form of text, images, sound, pictures and sounds, as well as data and graphics and in other forms using media electronics, print media and all types of channels available. The press underwent many changes from time to time, each era has its own characteristics. As a society that gets a lot of information through the press, we should also know the development of the press in Indonesia from the colonial era to the reform era. In terms of education, the Press has a very important role as a means of delivering information that is educational, informative, and educates students to always continue to work and innovate in order to improve the quality of the education system in Indonesia.

Keywords: *Press history, Indonesia, Education*

PENDAHULUAN

Pers dalam pengertian luas meliputi segala penerbitan, seperti pers elektrolit, radio siaran, dan televisi siaran. Sedangkan pers dalam arti sempit hanya terbatas pada pers cetak, yakni surat kabar, majalah, dan buletin kantor berita. Di era sekarang ini,

pers sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.

Secara etimologi kata pers berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Press* yang artinya tekanan, menekan, mesin pencetak. Dalam hal ini *press* didefinisikan sebagai mesin

cetak sehingga menghasilkan karya tulis yang dicetak dalam lembaran kertas.

Pengertian Pers Menurut Para Ahli

- a) Menurut Kustadi Suhandang pengertian Pers adalah seni atau keterampilan dalam mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita mengenai peristiwa yang terjadi sehari-hari, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayaknya.
- b) Menurut J.C.T Simorangkir pengertian pers adalah pengertian pers dalam arti sempit dan pengertian pers dalam arti luas. Dalam hal ini pengertian pers dalam arti sempit adalah hanya terbatas pada surat-surat kabar harian, mingguan, dan majalah.
- c) Menurut Marshall McLuhan pengertian pers adalah sesuatu yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lainnya dan peristiwa satu dengan peristiwa lain dalam satu momen yang bersamaan.
- d) Menurut Raden Mas Djokomono arti Pers adalah sesuatu yang membentuk pendapat umum melalui tulisan dalam surat kabar.
- e) Menurut Oemar Seno Adji definisi pers adalah pers dalam arti yang sempit dan juga pers di dalam arti yang luas. Dimana definisi pers adalah arti sempit adalah penyiaran gagasan serta

perasaan seseorang dengan cara yang tertulis.

- f) Menurut Frederich S. Siebert pengertian pers adalah semua media komunikasi massa yang memenuhi sebuah persyaratan publisistik ataupun tidak dan juga media komunikasi massa yang memenuhi persyaratan publisistik yang tertentu.
- g) Menurut L. Taufik pengertian pers adalah usaha-usaha dari alat komunikasi massa untuk memenuhi kebutuhan anggota-anggota masyarakat terhadap penerangan, hiburan, keinginan mengetahui peristiwa-peristiwa, atau berita-berita yang telah atau akan terjadi di sekitar mereka khususnya dan di dunia umumnya.
- h) Menurut Weiner definisi pers memiliki tiga arti. Pertama, wartawan media cetak. Kedua, publisitas atau peliputan. Ketiga, mesin cetak-naik cetak.

Fungsi Dan Peranan Pers

1. Fungsi Pers

a) Sebagai Media Informasi

Masyarakat menikmati pers sebab mereka membutuhkan informasi mengenai berbagai hal yang diperlukan dalam hidupnya, baik informasi politik, ekonomi (bisnis), hobi, life skill, atau bidang-bidang lainnya yang bermanfaat bagi kebutuhan hidupnya. Media

menjadi sarana informasi dalam kelompok masyarakat. media meyebarluaskan berbagai peristiwa, kejadian, dan tindakan dari warga atau kelompok masyarakat sehingga dapat diketahui masyarakat lain. Dalam hal ini, media sebagai sarana komunikasi dari media itu sendiri kepada masyarakat.

b) Sebagai Media Pendidikan

Pers juga dapat berfungsi sebagai media pendidikan (mass education). Pers dapat memuat informasi-informasi yang berguna dalam pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan hidup manusia. Dengan adanya pers, rakyat menjadi semakin cerdas karena bertambah wawasan pengetahuannya. Pers dapat memberikan pendidikan, wawasan pengetahuan, dan mencerdaskan masyarakat. Masyarakat yang secara teratur mencari dan mendapatkan berita dari pers akan semakin luas ilmunya, wawasannya dan pengetahuannya.

c) Sebagai Media Hiburan

Informasi yang disajikan oleh pers terkadang bersifat hiburan, baik melalui media cetak ataupun media elektronika. Hal ini sesungguhnya bukan hanya sekadar menimbang berita-berita yang berat, tetapi

kebutuhan hiburan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi.

d) Sebagai Media Kontrol Sosial

Pers harus bisa melaksanakan kontrol sosial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, baik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehadiran kontrol sosial dari pers untuk memperbaiki keadilan melalui media massa. Kontrol sosial yang dilakukan oleh pers merupakan hal yang sangat penting.

e) Sebagai Media Komunikasi

Pers menjadi sarana bagi antarpihak untuk melakukan hubungan, menjalin komunikasi, mendapatkan kebutuhan informasi, dan media untuk mengekspresikan diri, baik secara lisan, tertulis maupun secara visual. Media massa dapat menjadi media komunikasi dua arah, yaitu dari masyarakat ke negara dan dari negara ke masyarakat. Misalnya, negara membutuhkan informasi dari masyarakat mengenai program-program dan kebijakan negara, begitu pula masyarakat membutuhkan informasi-informasi

yang telah, sedang, atau akan dilaksanakan pemerintah.

f) Sebagai Lembaga Ekonomi

Saat ini, pers tidak hanya sekadar media informasi, namun sudah merupakan lembaga ekonomi. Artinya, pers tumbuh menjadi industri media yang mampu mendapatkan dan menyerap lapangan kerja yang cukup signifikan serta mendatangkan keuntungan yang sangat memadai. Oleh karenanya, tumbuhnya investasi dalam bidang pers ini cukup menjanjikan.

g) Sebagai Media Investigasi

Pers menjadi sarana untuk mengungkap masalah-masalah publik secara luas, seperti kebijakan pejabat, masalah pembangunan, program, dan usaha-usaha pemerintah kepada masyarakat. Informasi yang sebelumnya tertutup dan terbatas di kalangan pemerintahan dapat menjadi terbuka dan diketahui masyarakat. Pers dapat melakukan laporan dan penyediaan secara mendalam terhadap masalah publik yang sebelumnya tidak diketahui masyarakat menjadi diketahui masyarakat.

h) Sebagai Media Program Sosialisasi dan Kebijakan Publik dari Pemerintah Kepada Rakyat

Melalui perantara pers, program, keputusan, kebijakan dan peraturan-peraturan baru dari pemerintah semakin cepat sampai pada masyarakat. Seorang menteri yang mengeluarkan kebijakan baru dapat melakukan konferensi pers dengan mengundang para reporter dan wartawan. Dengan adanya keterbukaan, sangat mendukung untuk menghilangkan ketertutupan informasi. Berbagai program dan kebijakan pemerintah sesungguhnya merupakan masalah publik yang tidak boleh ditutup-tutupi kepada masyarakat

2. Peranan Pers

a) Sebagai Saluran Informasi kepada Masyarakat

Pers berperan untuk mencari dan menyebarkan berita secara cepat dan luas kepada masyarakat. Pers menjadi sarana informasi antarkelompok masyarakat. Dalam hal ini, pers sebagai sarana komunikasi dari pers itu sendiri kepada masyarakat dan pertukaran informasi antar masyarakat.

b) Sebagai Saluran bagi Debat Publik dan Opini Publik

Pers berperan sebagai sarana komunikasi dari bawah ke atas atau dari masyarakat ke negara. Masyarakat luas dapat menyampaikan beragam aspirasi, pendapat, kritik, usul, dan saran melalui pers. Pers menjadi sarana efektif dalam menampung berbagai aspirasi rakyat.

Perkembangan Pers Di Indonesia

1) Era Kolonial (1744 – 1900).

Pada masa ini, terbit surat kabar yang pertama yaitu *Bataviasche nouvelles en politique raisonnementen* tanggal 7 Agustus 1744 di Jakarta. Setelah 1850 muncul surat kabar berbahasa Melayu misalnya *Slomporet Malajoe* dan ada kurang lebih 30 surat kabar yang diterbitkan Hindia Belanda.

2) Era Perjuangan Kaum Nasionalis (1900 – 1942).

Pada masa ini, surat kabar pertama yang dibiayai, disunting, dan diterbitkan sendiri oleh orang-orang Indonesia yaitu *Soenda Berita* (1903) dipimpin oleh Raden Mas Thirtoadisuryo (*Perintis Wartawan Indonesia*). Namun pemerintah Belanda sering membredel surat kabar di Nusantara yang dianggap membangkang pemerintahan Hindia Belanda.

3) Era Transisi Pertama (1942 – 1945)

Pada masa ini, kehidupan pers diatur

oleh pemerintahan penjajah yang memberlakukan sistem lisensi dan sensor preventif. Jepang mendirikan surat kabar Jawa *Shimbun Ka* dan membentuk kantor berita Domei.

4) Era Pers Partisan (1945 – 1957).

Pada masa ini, ada sampai 1950-an ada 3 jenis surat kabar yang terbit di Indonesia, yaitu surat kabar republikan, surat kabar Belanda, dan surat kabar Cina. -Memasuki tahun 1950-an semangat pers muncul apalagi UUDS 1950 memberi jaminan kebebasan pers.

5) Era Pers Terpimpin (1957 – 1965).

Pada masa ini, pers mulai dikekang. Tanggal 12 Oktober 1960, Soekarno mengeluarkan peraturan yang mengharuskan setiap penerbit untuk mendaftarkan diri guna mendapatkan surat ijin terbit (SIT). Presiden Soekarno mengeluarkan berbagai kebijakan antara lain menempatkan percetakan swasta dalam pengawasan pemerintah, memberi wewenang kepada menteri penerangan untuk menyusun pedoman pers, serta menasionalisasi kantor berita ANTARA.

6) Masa Transisi Kedua (1965 – 1974).

Pers pada masa transisi kedua ini ditandai dengan lahirnya pemerintahan orde baru. Pers pro PKI seperti harian *Rakyat* dan 45 pers lainnya diberangus,

pemerintah melakukan pembersihan atas wartawan yang pro-PKI. Pada awal pemerintah orde baru pers menikmati kebebasan, pers bisa menyampaikan berita – berita politik yang kritis selama tak menentang pemerintah dan tidak pro komunis. Memasuki tahu 1970, pemerintah orde baru mulai bersikap lain, pemerintah mulai melakukan kontrol terhadap pers. Pemerintah melakukan campur tangan terhadap PWI. Memberikan sistem perizinan pers seperti pada era Soekarno.

7) Era Bisnis (1974 – 1988)

Pada masa ini pers makin tampil sebagai sebuah industri, karena pemerintahan orde baru berhasil melakukan perbaikan ekonomi sehingga tingkat daya beli masyarakat meningkat. Pada masa ini tiras surat kabar terus meningkat dan pada tahun 1989 mencapai 10,8 juta, diikuti dengan peningkatan jumlah pemasang iklan serta makin ketatnya pengendalian pers oleh masyarakat.

8) Masa Transisi Ketiga (1988 – 1999)

Pada akhir 1080 pemerintah orde baru mulai menunjukkan sedikit perubahan politik. Pers masih berhati – hati dalam menyikapi wacana keterbukaan politik agar kelangsungan hidupnya bertahan. Ketentuan mengenai SIUPP masih berlaku

Tahun 1993 pers mulai berani secara aktif menyajikan laporan mengenai berbagai kasus politik.

9) Era Reformasi (1999 – Sekarang).

Pasca runtuhnya orde baru 1998, era reformasi dimulai dengan naiknya B.J. Habibie sebagai presiden. Pada masa ini, pers mulai tumbuh lagi. Pada tanggal 6 Agustus 1999 disepakati Kode Etik Wartawan Indonesia, dan pada 14 Maret 2006 berhasil disepakati Kode Etik Jurnalistik sebagai ganti Kode Etik Wartawan Indonesia

Teori Tentang Pers

1. Teori Pers Otoritarian

Teori otoritarian adalah teori yang berpendirian bahwa pers haruslah dikuasai oleh negara (penguasa). Pers harus tunduk pada penguasa sebagai tempat dalam representasi dari negara tersebut. Hakikat pers adalah media penguasa untuk menyampaikan informasi yang dianggapnya perlu diketahui oleh setiap masyarakat. Sikap kritis atau konfrontatif pers terhadap penguasa sama sekali tidak dapat diterima. Sebab pers diasumsikan, bahwa penguasa tidak akan mungkin dapat berbuat salah atau infallible. Oleh karena itu, kebebasan pers tidak diperlukan begitu juga dengan adanya organisasi pekerja media bersifat independen. Media asing juga

dikendalikan dan diatur seperti halnya media-media yang ada dinegara tersebut yang diatur oleh penguasa.

Prinsip-prinsip teori pers otoritarian:

- Media akan selamanya tunduk pada penguasa
- Sensor diterapkan dan dapat diterima oleh pers
- Kecaman kepada penguasa baik itu penyimpangan kebijakannya ditiadakan
- Wartawan tidak memiliki hak kebebasannya

2. Teori Pers Libertarian

Teori libertarian disebut juga teori pers bebas. Teori libertarian adalah teori yang menganggap bahwa pers sebagai sarana penyalur hati nurani rakyat dalam mengawasi dan menentukan sikapnya terhadap setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Teori libertarian merupakan kebalikan dari teori otoritarian. Teori libertarian sebenarnya berakar dari pandangan pemikir pada abad ke-17 yaitu John Milton yang mengemukakan pendapatnya bahwa manusia tidak bisa lain pasti memilih ide-ide dan nilai-nilai terbaik. Sehingga teori libertarian diartikan sebagai individu yang mempunyai hak dalam mempublikasikan apapun yang diinginkannya atau disukainya. Pada sistem pers libertarian sendiri itu menyerang atau mengkritik setiap

kebijakan yang dilakukan pemerintah sepenuhnya bisa diterima, bahkan dianjurkan. Oleh karena itu pemerintah tidak dapat melakukan pembatasan terhadap keluar dan masuknya informasi dari setiap penjuru dunia. maka para jurnalis dan media memiliki otonomi penuh dalam organisasi-organisasi media yang dibentuknya.

Tugas-tugas teori pers libertarian:

- Melayani kehidupan public
- Memberi hiburan
- Mencari keuntungan (kelangsungan hidupnya)
- Melayani kebutuhan ekonomi (iklan)
- Menjaga hak warga negara (kontrol sosial)

Ciri-ciri teori pers libertarian:

- Tidak ada batas hukum dalam mencari berita
- Tidak diperlukannya izin dalam penerbitan dan pendistribusian informasi
- Publikasi yang bersifat bebas dari penyensoran
- Tidak ada kebijakan untuk memublikasikan segala hal
- Wartawan dan media memiliki otonomi penuh dan profesional
- Kecaman terhadap pejabat dan partai politik tidak dipidanakan
- Publikasi kesalahan dilindungi sama dengan publikasi kebenaran

sepanjang itu menyangkut opini dan keyakinan

3. Teori Pers Soviet (Komunis)

Teori pers soviet atau teori pers komunis adalah alat pemerintah atau partai yang berkuasa dan bagian integral dari negara sehingga pers tunduk kepada negara. Teori pers disebut juga pula teori Marxis-Leninis, karena teori pers soviet atau komunis berakar pada Revolusi Rusia tahun 1917 yang berdasarkan dari gagasan Karl Marx dan Friedrich Engels, yang dalam arti sempit teori pers soviet atau komunis yaitu pers dimiliki oleh negara dan berfungsi melayani kepentingan kelas pekerja.

Ciri-ciri teori pers komunis:

- Media tidak dimiliki secara pribadi
- Media dibawah kendali kelas pekerja karena pers melayani kelas tersebut
- Masyarakat berhak melakukan sensor.

4. Teori Pers Tanggung Jawab Sosial

Teori pers tanggung jawab sosial adalah teori yang mengemukakan kebebasan pers yang harus disertai dengan tanggung jawab kepada masyarakat, kebebasan pers diatasi oleh dasar moral dan hati nurani insan pers sebab kemerdekaan pers, harus disertai dengan tanggung jawab kepada masyarakat. Teori tanggung jawab

sosial muncul karena respon atas teori Libertarian. Dari akhir tahun 1940-an Komisi Serikat mengajukan model bahwa pers harus memiliki kebijakan tertentu kepada masyarakat. Kewajiban itu diungkapkan dalam sebuah semboyan yaitu informatif, benar, akurat, objektif, dan berimbang. Teori pers tanggung jawab sosial sebagai lawan dari teori libertarian dimana teori tanggung jawab sosial menuntut jurnalis untuk memiliki tanggung jawab, baik itu kepada pemerintah maupun juga kepada masyarakat khususnya.

Tugas teori tanggung jawab sosial:

- Memberi penerapan kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengatur dirinya sendiri
- Memberikan pelayanan kepada sistem politik dengan menyediakan informasi, diskusi dan perdebatan dalam masalah-masalah yang ada dimasyarakat
- Menyediakan hiburan
- Mandiri dalam biaya financial, sehingga bebas dalam kepentingan
- Melayani sistem ekonomi dengan mempertemukan pembeli dan penjual barang atau jasa dalam periklanan
- Sebagai pengawas pemerintah

Evaluasi Pers Di Indonesia

Dalam dunia pers, terdapat kode etik jurnalistik yang disepakati bersama sebagai landasan menjalankan pers. Kebebasan yang telah dibuka oleh pemerintah bagi insan pers memberi peluang kepadanya untuk memperoleh informasi seluas-luasnya secara tepat dan cepat. Tetapi di balik itu ada oknum yang menyalahgunakan kebebasan pers, antara lain :

- Digunakan sebagai alat politik bagi oknum tertentu untuk mencapai tujuan tertentu, berarti pers tidak lagi mampu menjadi alat kontrol yang baik,
- Melalui opini / pendapat yang bersumber dari SMS, orang dapat menyampaikan pendapatnya secara lugas, dimana dapat merugikan pihak-pihak tertentu,
- Media elektronik / TV, sering menayangkan acara yang jauh dari nilai-nilai pendidikan, bahkan bertabrakan dengan norma-norma masyarakat,
- Pejabat atau orang kaya yang diduga melakukan KKN, memeralat media massa untuk tidak mengekspos / memberitakan dengan imbalan tertentu.

Dampak negatif dari penyalahgunaan kebebasan media massa dapat dibedakan secara intern dan ekstern, yaitu :

1. Secara intern

- a) Pers tidak obyektif, menyampaikan berita bohong, lambat atau cepat akan ditinggal pembacanya
- b) Ketidaksiapan masyarakat untuk menggunakan hak jawab akan menimbulkan kejengkelan pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers, akan melakukan tindakan yang anarkhis dengan merusak kantor, bahkan tindakan fisik terhadap wartawan yang memberitakan.

2. Secara ekstern

- a) Mempercepat kerusakan akhlak dan moral bangsa,
- b) Menimbulkan ketegangan dalam masyarakat,
- c) Menimbulkan sikap antipati dan kejengkelan terhadap pers,
- d) Menimbulkan sikap saling curiga dan perpecahan dalam masyarakat,
- e) Mempersulit diadakannya islah/ merukunkan kembali kelompok masyarakat yang sedang konflik.

Dalam kaintannya dengan kebebasan Pers, perlu disimak apa yang dikemukakan oleh jurnalis dan ahli sejarah Amerika Serikat Paul Johnson. Ia mensinyalir adanya praktik menyimpang dalam kebebasan pers yang disebut “Tujuh Dosa Yang mematikan“ (Seven Deadly Sins), yaitu :

1) Distorsi Informasi

Lazim dilakukan dengan menambah atau mengurangi informasi, baik yang

menyangkut opini maupun ilustrasi faktual yang tidak sesuai dengan sumber aslinya. Akibatnya makna menjadi berubah.

2) Dramatisasi Fakta Palsu

Dipraktikkan dengan memberikan ilustrasi verbal, auditif atau visual yang berlebihan tentang suatu obyek. Dalam media cetak cara ini dapat dilakukan secara naratif (dalam bentuk kata-kata) atau melalui penyajian foto/gambar tertentu dengan tujuan membangun suatu citra negatif dan stereotip.

3) Mengganggu “Privacy”

Dilakukan peliputan kehidupan kalangan selebritis dan kaum elite, terutama yang diduga terlibat dalam suatu skandal. Cara yang dilakukan antara lain melalui penyadapan telepon, penggunaan kamera dengan telelens, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat pribadi, memaksa atau menjebak.

4) Pembunuhan Karakter

Praktik ini umumnya dialami secara individu, kelompok atau organisasi / perusahaan, yang diduga terlibat dalam perbuatan kejahatan. Biasanya dilakukan dengan mengeksploitasi, menggambarkan dan menonjolkan sisi “buruk” mereka saja. Padahal sebenarnya mereka memiliki segi baiknya.

5) Eksploitasi Seks

Praktik eksploitasi seks tidak hanya menjadi monopoli dunia periklanan. Praktek tersebut juga dilakukan dalam pemberitaan dengan cara menempatkan di halaman depan surat kabar, tulisan yang bermuatan seks.

6) Meracuni Benak / Pikiran Anak

Praktik ini dilakukan dengan cara menempatkan figur anak-anak. Akhirnya ini, praktik serupa semakin meningkat dengan penonjolan figur anak-anak sebagai sasaran atau pelaku dalam memasarkan berbagai macam produk.

7) Penyalahgunaan Kekuasaan

Penyalahgunaan kekuasaan tidak saja dapat terjadi di lingkungan pejabat pemerintahan, tetapi juga di kalangan pemegang kontrol kebijakan editorial / pemberitaan media massa.

Ketujuh “Dosa jurnalistik” itu menurut ahli komunikasi dari Universitas Indonesia, Sasa Djuarsa Senjaya, terjadi juga di Indonesia, terutama dilakukan media massa yang baru terbit. Beliau menyebutnya sebagai “Praktik Jurnalistik yang Menyimpang”, yaitu:

1. Eksploitasi Judul

Judul tidak sesuai dengan isi beritanya. Biasanya judul tersebut bernada agitatif, emosional, dan tidak jarang “seronok”. Tujuannya untuk menarik perhatian pembaca dan untuk meningkatkan sirkulasi.

2. Sumber Berita “Konon Kabarnya”

Tidak jarang pula sumber berita “konon kabarnya” atau ‘menurut sumber berita yang tidak mau disebut namanya’ dipraktikkan. Padahal salah satu implikasi dari prinsip obyektifitas adalah adanya kejelasan identitas dari berbagai sumber berita yang dirujuk.

3. Dominasi Opini Elite dan Kelompok Mayoritas

Pada umumnya media massa di Indonesia masih cenderung mengutamakan pemuatan opini, pendapat atau pernyataan kalangan elite dan mayoritas saja, misalnya para pakar, tokoh politik, kalangan selebritis, pejabat pemerintah, tokoh agama atau pengusaha. Aspirasi masyarakat bawah atau minoritas kurang mendapatkan perhatian.

4. Penyajian Informasi yang Tidak Investigatif

Penyajian informasi kurang bersifat investigatif, hanya menjual issue, tetapi kurang melengkapinya dengan pemberian makna dan interpretasi yang obyektif, komprehensif, dan mendalam.

Dampak positif yang diperoleh dengan adanya kebebasan pers yaitu:

- a) Pers menjadi penyalur aspirasi rakyat;
- b) Pers bebas mencari/mendapatkan kebenaran, sehingga dapat mewujudkan keadilan;

- c) Pers menjadi kontrol sosial yang bebas memberikan kritik, saran dan pengawasan;

- d) Pers menjadi penyebar informasi yang dapat memenuhi hak masyarakat;

- e) Pers menjadi wahana komunikasi massa;

- f) Pers menjadi penghubung antar sesama manusia;

- g) Pers menjadi pendidik karena bebas menyebarkan IPTEK;

- h) Pers menjadi pemberi hiburan kepada masyarakat.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dampak kebebasan pers dapat ditinjau dari berbagai kepentingan, antara lain :

1) Bagi Kepentingan Pribadi

Jasa Pers dapat meningkatkan citra positif seseorang. Sebaliknya karena pers, reputasi seseorang hancur. Padahal kenyataan dapat sebaliknya. Jadi, nama baik seseorang dapat dirugikan apabila terjadi penyalahgunaan kebebasan berpendapat dan penyampaian informasi.

2) Bagi Kepentingan masyarakat

Dengan bantuan media massa, fakta dapat dikamufase dengan tulisan lain yang berkesan membenarkan. Masyarakat dapat tertipu karena mendapat informasi yang tidak benar.

Misalnya kebijakan seorang tokoh tidak tepat bila dikaji secara ilmiah. Namun karena informasi yang diberikan berulang-ulang dan diekspos secara besar-besaran, masyarakat jadi terpengaruh.

3) Bagi kepentingan Negara

Penyalahgunaan kebebasan pers dapat merugikan kepentingan negara, karena tulisan-tulisan yang kurang mempeertimbangkan kepentingan nasional. Hal semacam itu akan menimbulkan dampak antara lain :

- Tingkat kepercayaan masyarakat menjadi berkurang. Masyarakat menjadi apatis terhadap program pemerintah.
- Kepercayaan luar negeri menjadi luntur. Akibatnya minat kerjasama, terutama kerjasama ekonomi, penanaman investasi, pemberian bantuan, pemberian pinjaman akan menurun.
- Timbulnya pergesekan hubungan antara pers dengan institusi tertentu, yang menyebabkan renggangnya hubungan karena pemberitaan yang tidak seimbang. Misalnya, TNI saat melakukan operasi militer menumpas GAM di Aceh.

Pentingnya pers bagi pelajar

Dilihat dari sisi sejarah, pers memainkan banyak peranan penting dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia. Pers

merupakan tonggak penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, salah satunya pendidikan.

Pers melahirkan banyak tokoh-tokoh penting dalam bidang pendidikan. Bapak pers Indonesia RM. Tirta Adisuryo merupakan tokoh pendidik yang sangat terkenal disamping Ki Hajar Dewantara. Rohana Kudus tokoh pers perempuan yang berasal dari Sumatera Barat mendirikan sekolah khusus perempuan agar para perempuan dapat tercerdaskan kehidupannya. Sebagai pelajar yang baik, pers dapat kita manfaatkan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi yang mendidik, menginspirasi, disamping itu juga pers dapat kita jadikan media pembelajaran yang bersifat informatif, menarik, dan berwawasan guna menghadapi tantangan perkembangan teknologi masa mendatang.

Pelajar era globalisasi dapat memanfaatkan pers sebagai media dan sarana pembelajaran pengembangan wawasan serta media terbaik dalam mengembangkan karya-karya yang bersifat mendidik, menginspirasi, dan membawa kemajuan yang baik terutama dalam bidang pendidikan. Dan pers menjadi penting bagi pelajar, karena pers dapat digunakan sebagai media pembelajaran dan akses memperoleh informasi yang informatif, mengedukasi, dan mengedukasi bagi para pelajar.

KESIMPULAN

Pers memiliki peranan yang sangat penting untuk bangsa ini mulai dari zaman kemerdekaan hingga saat ini, itu disebabkan karena antara pemerintah dan warga negara memerlukan komunikasi dan media yang dapat menghubungkan keduanya. Apalagi saat ini perkembangan pers di Indonesia sudah maju dengan pesat. Dengan adanya berita melalui koran, tabloid, majalah, radio, televisi, dan internet, masyarakat dapat dengan cepat mengetahui suatu kebijakan pemerintah. Penyajian berita atau kejadian melalui pers dapat diketahui masyarakat dengan cepat, akurat, dan efektif.

Tanpa adanya pers kita akan menjadi bangsa yang terbelakang karena media sangatlah dibutuhkan. Dapat disimpulkan bahwa fungsi & peranan pers di Indonesia antara lain:

- Media untuk menyatakan pendapat dan gagasan-gagasannya.
- Media perantara bagi pemerintah dan masyarakat.
- Penyampai informasi kepada masyarakat luas.

SARAN

Setelah mengetahui sejarah pers, perkembangan pers dan tokoh pers di

Indonesia penulis mengharapkan bahwa pembaca lebih paham sejarah pers dan ini dapat dijadikan ilmu sekaligus menambah wawasan khususnya di bidang jurnalistik.

REFERENSI

Gilster, P. 1997. *Digital Literacy*. New York: Wiley.

Kurnia, N . Dkk. 2017. Literasi Digital Keluarga. CfDC : Yogyakarta

Martin, Allan. (2008). Digital Literacy and the 'Digital Society' dalam Lankshear, C and Knobel, M (ed). *Digital literacies: concepts, policies and practices*. Die Deutsche Bibliothek

Waluyo D, (2014) *Kebebasan Pers dari Pandangan Wartawan, Kasus Wartawan PWI dan AJI* Tiara Wacana Lokus : Yogyakarta.

Manan, B,(2009) *Pers, Hukum, hak Asazi Manusia*, Dewan Pers : Jakarta

<http://www.artikelsiana.com/2015/03/teori-teori-pers-pengertian-teori-pers-tentang.html>

<http://pknsman3purworejo.blogspot.com/2013/05/mengevaluasi-kebebasan-pers-dan-dampak.html>